

Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada CV. Sahabat Sejati Palembang

Linawati^{*1}, Betri Sirajuddin², Raisa Pratiwi³

^{1,2}STIE MDP; Jl. Rajawali No.14 Palembang, (0711) 376400/(0711) 376360

³Jurusan Manajemen, STIE MDP, Palembang

Email : ^{*1}linaw397@gmail.com, ²betri.sirajuddin@gmail.com, ³Raisapратиwi@stie-mdp.com

Abstrak

Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui cara perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. Sahabat Sejati Palembang apakah benar dan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan serta untuk mengetahui apakah ada penghematan pajak atas perhitungan laporan koreksi fiskal sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak tahun 2013. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan sebagai analisis perencanaan pajak penghasilan untuk meminimalkan beban pajak atas koreksi fiskal sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak tahun 2013. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan pada CV. Sahabat Sejati Palembang untuk lebih baik lagi dalam melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah CV. Sahabat Sejati Palembang baru menerapkan perencanaan pajak pada tahun 2013, hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang dirasakan CV sahabat sejati antara sebelum dan sesudah perencanaan pajak khususnya dalam hal penghematan beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan.

Kata kunci—PPh Pasal 25, Laporan Koreksi Fiskal, Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak.

Abstract

The purpose of this paper is to know how to tax planning undertaken by CV. Sahabat Sejati Palembang is correct and in accordance with the tax laws as well as to determine, there are tax savings on the calculation report fiscal correction before tax planning and tax planning after 2013. This research method using a qualitative research approach, namely collecting, collating data obtained is then interpreted as an analysis of income tax planning to minimize the tax burden on fiscal correction before tax planning and tax planning after 2013. The results of this study are expected to provide guidance in decision-making on CV. Sahabat Sejati Palembang to get better doing tax planning in accordance with the applicable tax regulations. The conclusion of this study is the CV. Sahabat Sejati new Palembang implement tax planning in 2013, this is due to the perceived differences between the CV. Sahabat Sejati before and after tax planning especially in terms of savings tax burden which is owned by the company,

Keyword—PPh Pasal 25, Fiscal Correction Report, Before and After Tax Planning.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan (*profit*) yang merupakan tujuan utama didirikannya sebuah usaha/bisnis guna meningkatkan kesejahteraan pemilik beserta karyawannya. Selain itu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi setiap tahunnya. Keuntungan/laba bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan bagi suatu perusahaan, walaupun tidak semua perusahaan menjadikan laba sebagai tujuan utamanya akan tetapi dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan laba baik besar ataupun kecil.

CV. Sahabat Sejati Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan jasa kontraktor dan suplier pengadaan barang material. Permasalahan yang di alami dalam perusahaan ini karena belum adanya perencanaan pajak yang efektif dilihat dari laporan keuangan yang belum pernah adanya koreksi fiskal sejak berdirinya perusahaan CV. Sahabat Sejati Palembang tahun 2005. Permasalahan tersebut menyebabkan kesulitan dalam menentukan beban pajak yang dibayar akan menyebabkan pertambahan atau pengurangan laba perusahaan, dengan membuat perencanaan pajak penghasilan dan laporan koreksi fiskal pada laporan keuangan, serta dapat dianalisa dan memberikan rekomendasi bagi pihak perusahaan untuk melihat hasil dari membuat koreksi fiskal positif dan negatif pada laba kena pajak, dan sebagai alternatif serta bahan referensi dalam perencanaan pajak selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada CV. Sahabat Sejati Palembang**”.

Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal Pada CV. Sahabat Sejati Palembang”, dengan data historis perusahaan tahun 2013, dan ruang lingkup penelitian dibatasi pada masalah perencanaan pajak penghasilan dan meminimalisir koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan yaitu Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 dalam hal mengefisiensikan beban pajak yang akan terjadi tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perencanaan pajak penghasilan yang efektif dan dapat meminimalisir koreksi fiskal di CV. Sahabat Sejati Palembang

1.3 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

a. Penulis Sendiri

Adalah untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai penerapan perencanaan pajak dan sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir Jurusan Akuntansi Program Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang.

b. Peneliti Selanjutnya

Berguna sebagai bahan penelitian lanjutan dalam objek penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktisi

Perusahaan / Wajib Pajak Berguna sebagai masukan atau sumbangan pikiran mengenai perencanaan pajak yang sesuai dengan legalita undang undang perpajakan sehingga untuk menghemat pajak yang harus dibayar oleh CV. Sahabat Sejati Palembang

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Teori Kepatuhan (*Tax Compliance*)

Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaataan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan serta undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan juga merupakan perilaku yang taat hukum secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau suatu badan organisasi (Kristanty, 2015).

Pengetahuan Wajib Pajak berhubungan erat dengan kepatuhan pajak, pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, Undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib Pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan oleh peraturan dan undang-undang perpajakan dari pemerintah, seperti *Self Assessment System*, apabila mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu, semakin tinggi pendidikan Wajib Pajak maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan-peraturan perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (Kristanty, 2015).

1.4.2 Pengertian Pajak

Soemitro dalam Resmi (2013, h.18) Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan (yang bersifat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau imbalan lain yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan dalam pembayaran pengeluaran umum suatu negara.

1.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan Tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, terdapat tarif penghitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2010 adalah tarif Tunggal sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Yang telah disempurnakan oleh Undang-Undang Perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan didalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan sudah bisa diatasi. Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E terdapat fasilitas atas besarnya tarif Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

1.4.4 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2006, h.1) fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*
Pajak adalah sumber dana dari pembayaran Wajib Pajak ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulerend*
Pajak adalah alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan perekonomian.

1.4.5 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2013, h.11) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut dibawah ini :

- a. **Official Assessment System**
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparaturnya untuk menentukan dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung serta pemungutan pajak sepenuhnya ada di tangan aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparaturnya (peranan yang dominan ada pada aparaturnya).
- b. **Self Assessment System**
Sistem pemungutan yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam setiap tahun sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada di tangan Wajib Pajak. dan dianggap mampu menghitung pajaknya sendiri, dan mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku serta mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti penting membayar pajak pada tepat waktu.
- c. **Withholding System**
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, yang ditunjuk untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lain untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang telah ada. Berhasil atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pihak ketiga yang ditunjuk.

1.4.6 Pajak Penghasilan

Purwono (2010, h.86) Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, dan merupakan wujud kewajiban kenegaraan serta peran masyarakat dalam membiayai Pembangunan Nasional. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang materi pengenaan pajak yang menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan pajak), Objek Pajak (penyebab pengenaan pajak) dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) berdasarkan pengenaan yang merata dan pembebanan yang adil. Sedangkan tata cara pemungutan diatur dalam peraturan tersendiri dalam rangka untuk mewujudkan keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat dalam mempelajari, memahami, serta mematuhi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.7 Definisi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Sihombing (2009) menyatakan pengertian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, dan bertujuan untuk menyediakan data dan informasi dalam menghitung besarnya pajak terutang. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan fiskal, yang hanya memberikan penjelasan tentang biaya.
2. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, dan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam kegiatan pengambilan keputusan.

1.4.8 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Resmi (2013, h.378) menyatakan penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal karena terdapat perbedaan pada prinsip akuntansi, perbedaan metode dengan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dengan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dengan biaya.

1.4.9 Koreksi Fiskal

Amelia (2009) menyatakan Koreksi fiskal dilakukan Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya pada laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial dan bisnis yang ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi serta keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak yang terutang. Untuk kepentingan komersial dan bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku pada umumnya, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara metode observasi, teknik wawancara, dokumentasi data yang ada dan penelitian kepustakaan atau studi literatur

2.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dapat berupa catatan dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa karyawan dan bagian keuangan. Data sekunder adalah catatan atau dokumentasi mengenai perusahaan yaitu berupa absensi kehadiran dan gaji serta laporan keuangan CV. Sahabat Sehati Palembang.

2.3 Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis data deskriptif kualitatif yang akan digunakan untuk penelaahan secara sistematis. Didalam penerapan sistem informasi akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Perencanaan Pajak

Setelah dilakukannya koreksi fiskal terjadi perbedaan pada laba sebelum pajak, dimana yang dihasilkan makin meningkat. Untuk mengatasi kenaikan laba maka biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dijadikan biaya pengurang bruto (biaya fiskal). Perencanaan pajak yang dilakukan menggunakan cara-cara yang legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Cara yang dilakukan adalah menghindari sanksi-sanksi perpajakan dengan melihat celah-celah didalam peraturan-peraturan yang ditetapkan. Perencanaan-perencanaan yang mungkin dapat diterapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Jika biaya listrik dan telepon digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan dapat pengurangan penghasilan bruto. Perusahaan melakukan koreksi positif karena biaya telepon yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya pulsa 3 orang karyawan dengan 3 jabatan sebesar Rp 300.000,00 per bulan dan tergantung kebutuhan pemakaian dalam kegiatan operasional perusahaan. Biaya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari biaya perolehan yang sebagaimana telah dimaksud

dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler. Perencanaan pajak seharusnya dilakukan perusahaan adalah menggantikan biaya *voucher handphone* para karyawan dengan tunjangan lain dalam bentuk uang tunai, hal ini bisa menjadi penambahan penghasilan tetapi bagi perusahaan menjadi pengurang penghasilan sehingga dapat menghemat beban pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, salah satunya adalah tunjangan dalam bentuk uang tunai.

2. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor perlu dikoreksi sebesar 50%. Perencanaan pajak dilakukan untuk biaya pemeliharaan kendaraan bermotor agar seluruh biaya pemeliharaan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dengan cara memberikan tunjangan lain-lain dalam bentuk uang tunai kepada karyawan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) a Undang-Undang PPh tentang biaya-biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto, salah satunya adalah tunjangan dalam bentuk uang tunai.
3. Biaya *entertainment* sebesar Rp 20.310.900,00 tahun 2013. Maka perencanaan pajak dilakukan perusahaan dengan membuat daftar nominatif biaya *entertainment* agar biaya tersebut tidak dianggap fiktif sehingga bisa dibiayai perusahaan untuk mengurangi penghasilan bruto. Daftar nominatif dibuat secara lengkap atas transaksi yang terjadi dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh.
4. Untuk biaya rumah tangga kantor dikeluarkan perusahaan dalam rangka memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan perusahaan seperti tissue, pewangi ruangan, alat kebersihan, alat tulis kantor (ATK) dan lain sebagainya tidak dapat dijadikan biaya dalam laporan keuangan pajak. Biaya ini merupakan biaya yang masuk dalam *grey area*, sehingga berpotensi untuk dilakukan koreksi fiskal positif. Oleh karena itu perencanaan pajak dilakukan atas biaya rumah tangga dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan transaksi, maka biaya rumah tangga kantor dapat diakui sebagai biaya karena perpajakan mengakui suatu transaksi apabila transaksi mempunyai bukti-bukti yang mendukung.
5. Biaya dikeluarkan perusahaan dalam rangka kesejahteraan karyawan. Karyawan merupakan aset penting perusahaan, oleh karena itu tidak heran kalau setiap perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Tapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Karena itu, sebaiknya perusahaan mengupayakan semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan kepada karyawannya dalam bentuk tunjangan karena biaya ini merupakan biaya fiskal sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh. Perusahaan menetapkan sistem *reimbursement* dalam biaya kesehatan karyawan, dimana biaya ini harus dilakukan koreksi fiskal positif karena merupakan pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawan sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh. Perencanaan pajak seharusnya dilakukan perusahaan dengan memberi tunjangan kesehatan bagi karyawan. Bagi karyawan tunjangan bisa menjadi tambahan penghasilan sesuai dengan KEP-545/PJ/2000 bagi perusahaan menjadi pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) sesuai dengan pasal 6 ayat (1) a Undang-Undang PPh.
6. Untuk biaya lain-lain yang sebagian besar mencakup sumbangan dan hibah yang dikeluarkan perusahaan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang bruto, karena sumbangan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan.

3.2 Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal yang dapat menghasilkan penghasilan neto dan laba sesuai ketentuan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan

finansial sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

Berikut ini adalah tabel laporan laba-rugi CV. Sahabat Sejati Palembang yang disusun dengan laporan keuangan komersil dan laporan koreksi fiskal.

Tabel 3.1
CV. Sahabat Sejati
Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi Komersial dan Fiskal
Per, 31 Desember 2013

	Komersial	Sebelum Perencanaan Pajak		Setelah Perencanaan Pajak	
		Koreksi Fiskal	Fiskal	Tax Planning	Fiskal
PENDAPATAN					
Pendapatan usaha	1.109.457.300		1.109.457.300		1.109.457.300
Harga Pokok Penjualan	949.141.684		949.141.684		949.141.684
Laba Kotor	160.315.616		160.315.616		160.315.616
Beban Usaha					
Biaya Administrasi		50.973.256		36.413.256	
Biaya Gaji	74.792.150		23.818.894		60.232.150
Biaya BPJS/Asuransi	7.682.000		7.682.000		7.682.000
Biaya Entertainment	20.310.900		20.310.900		20.310.900
Biaya Penghapusan piutang	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0
Biaya Penyusutan	22.750.000		22.750.000		22.750.000
Biaya Listrik,Air & Telp	2.509.000		2.509.000		2.509.000
Biaya ATK	1.556.000		1.556.000		1.556.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	21.404.712		21.404.712		21.404.712
Biaya Pulsa Karyawan	10.800.000		10.800.000		10.800.000
Total biaya	191.964.762		110.831.506		147.244.762
PENDAPATAN (BEBAN)					
LAIN-LAIN					
Pendapatan lain-lain	53.000.000	21.200.000	31.800.000	21.200.000	31.800.000
Beban lain-lain	14.560.000		14.560.000		14.560.000
Laba Sebelum Pajak	70.089.146	87.773.256	32.244.110	73.213.256	4.169.146

Sumber : Laporan Komersial CV. Sahabat Sejati, 2015

Dari tabel 4.2 dapat dijelaskan biaya-biaya yang dikoreksi positif yaitu:

1. Biaya pemberian sumbangan dan hibah sebesar Rp 14.560.000,-
2. Biaya *entertainment* sebesar Rp 20.310.900,-
3. Biaya pulsa / *voucher* karyawan dikoreksi 50% sebesar Rp 5.400.000,-
4. Biaya BBM dan service kendaraan (motor dan mobil) dikoreksi 50% sebesar Rp 10.702.356,-

Semua biaya diatas masuk dalam biaya umum dan administrasi dengan total sebesar Rp 50.973.256,-

5. Biaya penghapus piutang dikoreksi positif sebesar Rp 15.600.000,-
6. Pendapatan lain-lain dikoreksi positif sebesar Rp 21.200.000,- yang diperoleh dari jumlah pendapatan bunga deposito Rp 21.200.000,-

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tahun 2013 yaitu dengan cara membuat daftar nominatif untuk biaya *entertainment* sebesar Rp 20.310.900,- sehingga dapat menjadi biaya fiskal atau dikoreksi negatif, pulsa/*voucher* karyawan dikoreksi 50% Rp

5.400.000,- BBM dan service kendaraan (motor dan mobil) dikoreksi 50% sebesar Rp 10.702.356,- biaya ini dijadikan tunjangan lain-lain dalam bentuk uang tunai sehingga seluruh biaya ini dapat dikoreksi negatif. Sebenarnya masih banyak biaya-biaya komersil tahun 2013 yang dikoreksi positif dapat menjadi koreksi negatif sehingga mengurangi laba sebelum pajak seperti biaya rumah tangga kantor, biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka kesejahteraan karyawan yaitu seragam karyawan, dan biaya lain-lain yang sebagian besar mencakup pemberian sumbangan, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan bagian keuangan perusahaan biaya-biaya tersebut tidak dilakukan koreksi.

Dari data di atas kita dapat menghitung besarnya PPh Badan yang terutang sebagai berikut:

3.3 Pembahasan Analisis Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak

Dikarenakan Penghasilan Bruto Perusahaan dibawah Rp 4.800.000.000,- menurut Pasal 31E, dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak

Sebelum Perencanaan Pajak		Setelah Perencanaan Pajak	
Jumlah PKP yang memperoleh fasilitas adalah: $50\% \times 25\% \times$ Rp 32.244.110	Rp 4.030.513	Jumlah PKP yang memperoleh fasilitas adalah: $50\% \times 25\% \times$ Rp 4.169.146	Rp 521.143
Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas adalah: Rp 32.244.110 – Rp 4.030.513	Rp 28.213.597	Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas adalah: Rp 4.169.146 – Rp 521.143	Rp 3.648.003
Jadi PPh Badan Pasal 25 yang terutang adalah: $50\% \times 25\% \times$ Rp 4.030.513) + $25\% \times$ Rp 28.213.597	Rp 7.557.213	Jadi PPh Badan Pasal 25 yang terutang adalah: $50\% \times 25\% \times$ Rp 521.143 + $25\% \times$ Rp 3.648.003	Rp 977.142
Laba setelah pajak adalah: Rp 32.244.110 – Rp 7.557.213	Rp 24.686.897	Laba setelah pajak adalah: Rp 4.169.146 – Rp 977.142	Rp 3.192.004

Tabel 3.3
Persentase Penghematan PPh Badan
Setelah Perencanaan Pajak

Tahun	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak	Persentase Penghematan
2013	7.557.213,-	977.142,-	87,1%

Sumber: Penulis, 2015

Adanya perencanaan pajak pada tahun 2013 ini maka banyak hal yang mempengaruhi PPh Badan yang terutang. Pajak terutang jauh lebih kecil dari sebelumnya senilai Rp 7.557.213,- dan di analisis lebih kecil sebesar Rp 977.142,- dengan nilai persentasi penghematan sebesar 87.1 %.

Penghematan PPh Badan tersebut diperoleh karena biaya-biaya komersil dapat dimaksimalkan untuk dikoreksi fiskal sehingga jumlah PPh Badan terutang dapat diminimalkan. Hal ini mempengaruhi laba bersih setelah pajak dan menjadi menurun dari Rp Rp 24.686.897 menjadi Rp 3.192.004,- dan memperoleh penghematan PPh Badan senilai 87.1%

3.4 Keefektifan Perencanaan Pajak Yang Diterapkan CV. Sahabat Sejati

Ada beberapa usaha yang dilakukan CV. Sahabat Sejati Palembang dalam meminimalkan beban pajak dengan beberapa hal seperti dibawah ini :

1. Analisis biaya komersil yang disinkronisasikan dengan analisis perhitungan fiskal agar nilai beban pajak dapat lebih minimal.
2. Mengontrol dan memonitoring setiap pelaksanaan perencanaan pajak setiap periodenya..

Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan maka perencanaan pajak yang dilakukan CV. Sahabat Sejati Palembang dapat meminimalkan laba sebelum pajak sehingga dapat menghemat beban pajak terutangnya, tahun 2013 laba komersil sebelum pajak Rp 70.089.146,- setelah dikoreksi fiskal menjadi Rp 32.244.110.

4. KESIMPULAN

Dari analisis tentang perencanaan pajak dan dengan adanya koerksi fiskal terhadap laporan keuangan CV. Sahabat Sejati, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perencanaan pajak yang efektif dapat dihasilkan melalui analisis terhadap laporan keuangan dengan cara melakukan koreksi yang maksimal terhadap laporan keuangan seperti dengan penyesuaian biaya-biaya komersil dapat dimaksimalkan untuk dikoreksi fiskal dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5. SARAN

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada CV. Sahabat Sejati dalam perencanaan pajak yang efektif, sebagai berikut

1. Harus adanya laporan koreksi fiskal yang dikoreksi berdasarkan laporan komersil agar setiap laporan pajak dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketaatan peraturan pemerintah.
2. Belum maksimalnya kualitas penyusunan dan analisis laporan pajak, dikarenakan belum adanya karyawan yang benar-benar mahir dalam hal perpajakan. Seharusnya CV. Sahabat Sejati memiliki karyawan yang dapat dengan mahir mengerti akan pajak agar pelaporan pajak dan analisis pajak dapat berjalan dengan baik dan efektif.

3. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya dapat menambah variabel yang lebih mempengaruhi laba penghasilan dengan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen jurusan manajemen yang telah membimbing, membantu dan memberikan ilmu serta pengetahuan dalam proses perkuliahan, mama dan papa atas dukungan moril dan finansial selama ini. Juga kepada teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, buat kekasih yang selalu mensupport, membantu menemani dalam proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aryanti, Dewi Yessica 2013, *Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. X Semarang*. Universitas Surabaya. Surabaya.
 - [2] Efendi, Igna 2014, *Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
 - [3] Kristanty, Nova 2015, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Dikantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*. Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi MDP. Palembang
 - [4] Mardiasmo 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2006, Andi Offset, Yogyakarta
 - [5] Mardiasmo 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Andi Offset, Yogyakarta
 - [6] Purwono, Herry 2010, *Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta
 - [7] Pohan, Anwar, Chairil 2013, *Manajemen Perpajakan*, Gramedia, Jakarta
 - [8] Rosa, Dina Indria 2009, *Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Badan Sebagai Upaya dalam Meminimalisasi PPh Badan yang Terutang pada PT. X Surabaya*. Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas. Surabaya.
 - [9] Resmi, Siti 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
 - [10] Rachman, Andika 2012, *Analisis Perencanaan Pajak Atas Penghasilan Badan dalam Rangka Penghematan Pajak pada PT. United Tractor Tbk*.
 - [11] Resmi, Siti 2013, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta
 - [12] Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
 - [13] Suryabrata, Sumadi 2008, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
-

- [14] Suandy, Erly 2011, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
 - [15] Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
 - [16] Undang-undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Mitra Wacana Media : Jakarta
 - [17] Waluyo 2009, *Akuntansi Pajak*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta
 - [18] Waluyo 2011, *Akuntansi Pajak*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta
-